

Names, addresses and description of complainants' circumstances are deleted at their request for confidentiality

KRuHA

koalisi rakyat untuk hak atas air
people's coalition for the rights to water

Jl. Mampang Prapatan VIII R-13, Jakarta Selatan – 12790

www.kruha.org, Email: kruha@kruha.org

Phone: (62-21) 7992945, Fax: (62-21) 7996160

Jakarta, 24 Desember 2010

Hal : Pengaduan atas penggusuran orang terkena dampak di Bekasi akibat proyek ICWRMIP Loan INO 37049

Lampiran :

1. Surat Kuasa dari Orang Terkena Dampak
2. Surat pemberitahuan penggusuran
3. Korespondensi dengan pihak *Operation Department* dan Pemerintah Indonesia.
4. *Submission* ARUM terkait proyek ICWRMIP- Loan ADB INO-37049
5. Dukungan terhadap *submission*

Kepada Yth.

Tim OSPF Asian Development Bank (ADB)

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami ARUM (Aliansi Rakyat untuk Citarum), sebuah kelompok masyarakat sipil yang peduli akan pengelolaan yang berkelanjutan dan berkeadilan sungai Citarum (sebagian besar dari kami adalah stakeholder dari sungai Citarum), mewakili 3 orang terkena dampak, yaitu:

1. Nama: _____
Alamat : _____
Keterangan: _____

2. Nama: _____
Alamat: _____
Keterangan: _____

3. Nama: _____
Alamat: _____
Keterangan: _____

Surat kuasa dari nama-nama tersebut diatas kami lampirkan. Kami meminta agar nama-nama mereka **DIRAHASIKAN** untuk menjaga keamanan kehidupan mereka dari ancaman, intimidasi, serta tekanan yang sudah muncul dan mungkin akan muncul dari proyek ini.

Berdasarkan proses verifikasi yang sudah kami lakukan, penggusuran ini adalah bagian dari proses yang direncanakan dalam dokumen Resettlement Plan Loan INO 37049. Pengakuan dari OTD yang kami wakili, mereka hanya diberitahu tanpa diminta pendapatnya mengenai proyek yang akan berlangsung.

Names, addresses and description of complainants' circumstances are deleted at their request for confidentiality

KRuHA

koalisi rakyat untuk hak atas air
people's coalition for the rights to water

Jl. Mampang Prapatan VIII R-13, Jakarta Selatan – 12790

www.kruha.org, Email: kruha@kruha.org

Phone: (62-21) 7992945, Fax: (62-21) 7996160

Persoalan yang muncul pada komplain ini adalah bahwa Orang terkena Dampak yang kami wakili tidak memperoleh kompensasi sama sekali, dan mereka sudah tergusur. Kondisi yang mereka rasakan dan alami sekarang adalah, rasa tidak aman dan nyaman karena kehilangan tempat tinggal, juga terputusnya sumber kehidupan mereka, karena usaha mereka turut tergusur.

Kondisi terkini, pada tanggal 21 Desember 2010, kembali terjadi pengusuran di sepanjang Tarum Kanal Barat di Kabupaten Bekasi (Kampung Cilampayan sampai ke Tegal Gede). Pemerintah Kabupaten Bekasi menyebarkan surat pemberitahuan per tanggal 10 November 2010, tapi Orang Terkena Dampak menerima suratnya tanggal 2 Desember 2010. Rumah dan aset orang terkena dampak habis pasca pengusuran, dan tanpa kompensasi.

Berikut ini kisah mereka:

- **Orang Terkena Dampak (OTD) I**

- **Orang Terkena Dampak (OTD) II**

- **Orang Terkena Dampak (OTD) III**

Kronologis kasus yang dapat kami ceritakan melalui surat ini adalah bahwa daerah ini telah mengalami pengusuran beberapa kali, yaitu pada bulan **September 2008, Agustus dan Oktober 2009, Maret 2010, serta Desember 2010**. Sementara yang kami pelajari dari dokumen Review Mission Updates tersebut, aktivitas pengusuran baru akan dimulai tahun 2010¹. Serta sebelum proyek dieksekusi, mereka yang terkena dampak tidak seluruhnya tercatat di dokumen ADB, dan walaupun ada yang sudah tercatat, mereka mengaku bahwa kunjungan dilakukan lebih dari 2 tahun yang lalu dan tetap digusur tanpa kompensasi.

Dengan brutal dan semena-mena masyarakat sudah digusur tanpa pemahaman yang jelas akan kondisi pengusuran dan mengapa digusur. Masyarakat diinformasikan secara

¹ Berdasarkan pertemuan masyarakat korban dengan pihak IRM tanggal 3 November 2010, pengusuran baru akan dilakukan pada tahun 2011 setelah proses perbaikan Dokumen Rencana Pengusuran (Resettlement Plan) selesai dilakukan.

**Names, addresses and description of complainants' circumstances are deleted
at their request for confidentiality**

KRuHA

koalisi rakyat untuk hak atas air
people's coalition for the rights to water

Jl. Mampang Prapatan VIII R-13, Jakarta Selatan – 12790

www.kruha.org, Email: kruha@kruha.org

Phone: (62-21) 7992945, Fax: (62-21) 7996160

mendadak mengenai penggusuran yang akan menimpa mereka, tanpa ada tempat pindah serta transportasi yang jelas.

Kami pernah mengajukan keluhan kami kepada OSPF untuk kasus serupa pada tanggal 8 Desember 2009, dimana pada tanggal 19 Januari 2010, Tim OSPF – ADB menyatakan keluhan kami sebagai 'non-illegible' dengan alasan belum berkomunikasi dengan pihak manajemen (*operation departement*) www.adb.org/SPF/registry.asp. Alasan ini tidak dapat kami terima, karena sejak awal kami terus mendialogkan kepedulian dan keprihatinan kami dengan berbagai pihak di ADB sebagaimana kami lampirkan dalam surat ini.

Hingga saat ini, kami sudah pernah melakukan komunikasi beberapa kali dengan pihak manajemen ADB, dengan rangkuman sebagai berikut:

1. Maret 2008 bertemu dengan pihak manajemen ICWRMIP di Manila, yaitu Christopher Morris, Nasimul Islam, Oka dan Sari Wooster. Kami mengajukan kekhawatiran kami dan meminta klarifikasi mengenai proyek ini ke pihak manajemen. Beberapa konsern kami adalah masalah partisipasi, transparansi, scenario MFF, potensi penggusuran dan pengelolaan lingkungan. Kami tidak memperoleh jawaban memuaskan dari mereka. Bahkan dokumen terkait konsultasi yang dijanjikan untuk dikirim tidak kunjung dikirim hingga saat surat ini dilayangkan.
2. Juli 2008 bertemu dengan para pihak, termasuk Bappenas (Donny Azdan), PU, stakeholder lain serta pihak ADB (Christopher Morris dan Syarifah Wooster)
3. 1 Desember 2008 mengirimkan dokumen analisa ARUM terhadap proyek ICWRMIP-analisa Resettlement Plan kepada:
 - Executive Directors
 - Operation Department (termasuk Indonesian Resident Mission)
 - Pihak Pemerintah Indonesia (Bappenas, PU, Deptan, Depkeu, dll).Ada jawaban terhadap dokumen *submission* tersebut dari pihak *Operation Department*, tapi kami merasa tidak puas dengan jawabannya, terutama mengenai hal-hal yang menyangkut OTD.
4. 3-5 Mei 2008, kami bertemu dengan beberapa Executive Directors untuk menanyakan posisi sebenarnya tentang ICWRMIP dan respon mereka terhadap dokumen analisa proyek ARUM.
5. 19 Juni 2009, kami bertemu kembali dengan Christopher Morris, Ayun Sundari, Syarifah Aman Wooster, serta konsultan Ratih di Bandung. Tapi tetap tidak ada jawaban yang memuaskan terhadap kegelisahan kami terhadap proyek ini, khususnya terhadap proses konsultasi yang kami nilai sangat tidak cukup untuk proyek berdampak pada masyarakat dengan kategori A ini.
6. 3 November 2010, ARUM bersama beberapa korban penggusuran bertemu dengan James Nugent, Thomas Pannela, Ayun Sundari dan beberapa konsultan ICWRMIP

Names, addresses and description of complainants' circumstances are deleted at their request for confidentiality

KRuHA

koalisi rakyat untuk hak atas air
people's coalition for the rights to water

Jl. Mampang Prapatan VIII R-13, Jakarta Selatan – 12790

www.kruha.org, Email: kruha@kruha.org

Phone: (62-21) 7992945, Fax: (62-21) 7996160

bertemu di Jakarta (restoran Es Teler 77). Kami mempertanyakan kasus penggusuran yang dialami oleh masyarakat di sepanjang bantaran Tarum Kanal Barat. Menurut ADB, penggusuran itu bukan dilakukan oleh ICWRMIP proyek tetapi oleh Pemerintah Daerah Bekasi. Menurut kami, jawaban dari pihak manajemen ICWRMIP dan IRM ADB sangat tidak berdasar, karena masyarakat yang menjadi korban penggusuran tersebut adalah masyarakat yang terdaftar sebagai masyarakat terkena dampak dalam Dokumen Rencana Penggusuran (Resettlement Plan) program ICWRMIP.

Dari semua proses yang sudah kami lakukan ke pihak terkait baik pemerintah Indonesia maupun ADB, tidak ada yang dapat menjawab mengenai proses konsultasi yang sangat kurang hingga akhirnya masyarakat tergusur dari rumah dan penghidupannya.

Menimbang fakta-fakta yang ada, maka kami memohon agar pihak OSPF dapat mendorong agar pihak manajemen terkait untuk menjalankan poin-poin implementasi sesuai dengan dokumen Rencana Penggusuran (Resettlement Plan) milik ADB, yaitu antara lain:

- 1. Memberikan ganti rugi yang layak sesuai kebijakan ADB (terhadap perumahan dan pekerjaan mereka yang turut tergusur karena penggusuran)**
- 2. Memberikan dana kepada OTD untuk kepindahan mereka ke lokasi baru**
- 3. Memberikan mereka lokasi yang pasti agar mereka dapat tinggal dengan layak**
- 4. Memberikan mereka modal untuk memulai usaha mereka kembali yang sempat hancur karena proses penggusuran yang semena-mena**
- 5. Memperbaiki berbagai proses yang terkait dengan proyek ICWRMIP yang meliputi proses informasi, konsultasi, dan perencanaan penggusuran di semua wilayah proyek agar memenuhi unsur akuntabilitas.**

Selain itu, demi kepentingan para korban, kami meminta agar OSPF meninjau ulang dokumen penerapan proyek ICWRMIP, terutama melihat kembali dampak yang akan menimpa masyarakat dan lingkungan, agar tidak terjadi lagi kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan proyek.

Hormat kami,



Hamong Santono
Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air-KRuHA
Anggota ARUM (Aliansi Rakyat untuk Citarum)